

**AFILIASI:**

^{1,2} Magister Akuntansi, Fakultas
Ekonomika dan Bisnis, Universitas
Diponegoro.

***KORESPONDENSI:**

annisadiahkp@students.undip.ac.id

THIS ARTICLE IS AVAILABLE IN: <https://e-journal.umc.ac.id/index.php/JPK>

DOI: [10.32534/jpk.v12i3.7084](https://doi.org/10.32534/jpk.v12i3.7084)

CITATION:

Piri, A. D. K., & Mutmainah, S. . (2025).
Medeteksi Indikasi Kecurangan Laporan
Keuangan di BUMN: Analisis Tata Kelola
Perusahaan dan Moderasi Biaya Audit .
Jurnal Proaksi, 12(3), 360–377.
<https://doi.org/10.32534/jpk.v12i3.7084>

Riwayat Artikel :**Artikel Masuk:**

24 Maret 2025

Di Review:

26 April 2025

Diterima:

26 Juni 2025

Medeteksi Indikasi Kecurangan Laporan Keuangan di BUMN: Analisis Tata Kelola Perusahaan dan Moderasi Biaya Audit

Annisa Diah Kusuma Piri^{1*}, Siti Mutmainah²

Abstrak

Tujuan Utama - Penelitian ini menguji peran biaya audit sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara tata kelola perusahaan terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.

Metode – Populasi mencakup seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023 dan sampel sebanyak 100 perusahaan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*.

Temuan Utama - Ditunjukkan berdasarkan hasil penelitian bahwa frekuensi yang terdapat dalam rapat dewan komisaris dipengaruhi negatif terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan, sedangkan terdapat pengaruh positif dari komisaris independen. Selain itu, biaya audit memperkuat pengaruh frekuensi rapat dewan komisaris terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan, sedangkan biaya audit melemahkan komisaris independen.

Implikasi Teori dan Kebijakan – Implikasi dari temuan ini bagi perusahaan untuk memperkuat sistem tata kelola perusahaan dan menjadi landasan dalam menetapkan kebijakan biaya audit yang ideal guna meningkatkan kualitas audit serta efektivitas pengawasan dalam mencegah indikasi kecurangan laporan keuangan.

Kebaruan Penelitian – Penelitian ini menyoroti peran biaya audit dalam memperkuat efektivitas tata kelola perusahaan dalam mencegah indikasi kecurangan laporan keuangan, yang belum banyak dibahas dalam studi sebelumnya.

Kata Kunci: Kecurangan Laporan Keuangan, Tata Kelola Perusahaan, Dewan Komisaris, Biaya Audit, BUMN.

Abstract

Main Purpose - This study examines the role of audit fees as a moderating variable in the relationship between corporate governance and financial statement fraud indications in state-owned enterprises (SOEs) listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2019 to 2023.

Method - The population includes all State-Owned Enterprises (BUMN) listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2019-2023 period and a sample of 100 companies was selected using the purposive sampling technique.

Main Findings - The results show that board meeting frequency has a negative effect on financial statement fraud indications, while independent commissioners have a positive effect. Additionally, audit fees strengthen the influence of board meeting frequency on financial statement fraud indications but weaken the effect of independent commissioners.

Theory and Practical Implications - These findings encourage companies to strengthen corporate governance systems and serve as a basis for setting optimal audit fee policies to enhance audit quality and supervisory effectiveness in preventing financial statement fraud indications.

Novelty - This study highlights the role of audit fees in enhancing corporate governance effectiveness in preventing financial statement fraud indications, an aspect that has received limited attention in previous research.

Keywords: Financial Statement Fraud, Corporate Governance, Board of Commissioners, Audit Fees, SOEs.

PENDAHULUAN

Kecurangan dalam laporan keuangan menjadi salah satu permasalahan etika paling serius yang mengancam dunia bisnis modern. Meskipun berbagai upaya pencegahan telah dilakukan, kecurangan tetap terjadi di berbagai sektor dan membawa dampak negatif yang besar terhadap kredibilitas perusahaan serta stabilitas ekonomi secara luas (Rostami & Rezaei, 2022). Skema kecurangan telah dikelompokkan oleh *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) ke dalam tiga kategori utama yang disebut *fraud tree*, salah satunya adalah kecurangan dalam laporan keuangan. Kecurangan ini mencakup manipulasi informasi keuangan yang sengaja dilakukan untuk menipu pihak-pihak berkepentingan seperti investor, kreditor, dan regulator (Arum et al., 2023).

Berdasarkan hasil survei *fraud* global ACFE tahun 2024, kecurangan laporan keuangan memang merupakan jenis kecurangan yang paling jarang terjadi, tetapi dampak finansial yang ditimbulkan sangat besar (ACFE, 2024). Namun, hasil ini berbanding terbalik dengan temuan Indonesia yang menunjukkan bahwa kecurangan laporan keuangan justru menyebabkan kerugian paling kecil dibandingkan jenis kecurangan lain seperti korupsi dan penyalahgunaan aset (ACFE Indonesia, 2019). Meski demikian, implikasi yang ditimbulkan terhadap reputasi dan kepercayaan pemangku kepentingan tetap menjadi ancaman besar yang tidak dapat diabaikan.

Fenomena ini juga tercermin dalam kasus nyata di Indonesia, khususnya di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). PT Waskita Karya (Persero) Tbk misalnya, dilansir dari berita Kompasiana.com diduga melakukan manipulasi laporan keuangan dan proyek fiktif sejak tahun 2016, yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp202 miliar. Berdasarkan temuan BPK RI, kasus di PT Indofarma (Persero) Tbk menunjukkan adanya transaksi fiktif, manipulasi laporan keuangan, dan penyalahgunaan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi, dengan kerugian yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp400 miliar. Data ini menunjukkan bahwa kecurangan laporan keuangan pada BUMN merupakan masalah serius yang harus ditangani melalui mekanisme pengawasan yang lebih efektif.

Penerapan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) merupakan salah satu konsep krusial dalam upaya pencegahan kecurangan laporan keuangan. *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) menjelaskan bahwa tata kelola perusahaan merupakan sekumpulan prinsip yang mengatur keterkaitan antara pihak manajemen, dewan komisaris, investor pemilik saham, serta para pihak berkepentingan lainnya dalam rangka menjalankan kontrol terhadap perusahaan. Implementasi tata kelola perusahaan yang baik berfondasi dengan lima prinsip untuk memastikan perusahaan dikelola secara akuntabel, transparan, adil, independen, dan tanggung jawab, diyakini dapat meningkatkan integritas laporan keuangan dan menekan risiko kecurangan.

Dalam kerangka tata kelola perusahaan, struktur dewan komisaris memegang peranan sentral. Karakteristik dewan seperti independensi, ukuran, dan frekuensi rapat merupakan faktor yang berpotensi mempengaruhi efektivitas pengawasan terhadap laporan keuangan

(Abdul Gafoor et al., 2018; Kouaib & Almulhim, 2019). Komisaris independen dapat memastikan pengawasan yang objektif dan mengurangi konflik kepentingan. Ukuran dewan komisaris yang memadai dan frekuensi rapat yang cukup tinggi juga dinilai dapat memperkuat fungsi pengawasan dan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan.

Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang tidak konsisten terkait korelasi antara karakteristik dewan komisaris dengan indikasi kecurangan laporan keuangan. Arum et al. (2023) dan Sadique et al. (2019) menemukan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap indikasi kecurangan, sementara Girau et al. (2022) mendapati pengaruh positif, dan Mukhibad et al. (2021) dan Uwugbe et al. (2019) justru menemukan tidak adanya pengaruh signifikan. Pada aspek komisaris independen, penelitian Kaituko et al. (2023), Popa Sabău et al. (2024), Rostami & Rezaei (2022) dan Mousavi et al. (2022) mengidentifikasi pengaruh negatif terhadap indikasi kecurangan,

sedangkan Koolivand et al. (2023) menemukan pengaruh positif, dan Girau et al. (2022) dan Mukhibad et al. (2021) tidak mendapati korelasi yang signifikan. Sementara itu, frekuensi rapat dewan komisaris menunjukkan temuan beragam, beberapa studi menemukan hubungan negatif dengan indikasi kecurangan (Kaituko et al., 2023; Nasir et al., 2019; Rostami & Rezaei, 2022), namun Maharani & Ainiyah (2022) menunjukkan hubungan positif, yang mengindikasikan bahwa rapat yang terlalu sering dapat menjadi tanda adanya permasalahan serius dalam perusahaan. Penelitian Girau et al. (2022) justru menemukan tidak adanya pengaruh signifikan. Ketidakkonsistenan ini mengindikasikan adanya faktor lain yang mungkin memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut, sehingga diperlukan variabel moderasi. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk menggunakan biaya audit sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini untuk memperdalam pemahaman tentang hubungan antar variabel yang diteliti dan membantu menghasilkan kesimpulan yang lebih akurat.

Efektivitas pengawasan dewan komisaris terhadap manajemen tidak hanya bergantung pada karakteristik dewan komisaris, tetapi juga pada kualitas audit eksternal yang diterima perusahaan yang tercermin dari besaran biaya audit yang dibayarkan oleh perusahaan. Biaya audit merupakan kompensasi atas usaha dan risiko yang ditanggung auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan (Li et al., 2020). Auditor yang memperoleh imbalan dalam jumlah lebih besar cenderung dilengkapi dengan sumber daya yang lebih memadai guna melaksanakan audit secara lebih teliti dan menyeluruh, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dewan komisaris terhadap indikasi kecurangan.

Tidak serupa dengan studi (Kaituko et al., 2023) yang fokus pada perusahaan di negara-negara Afrika Timur dan belum mempertimbangkan perbedaan sistem tata kelola perusahaan seperti *two-tier system* di Indonesia, penelitian ini berfokus pada BUMN di Indonesia yang menerapkan pemisahan tegas antara fungsi dewan direksi dan dewan komisaris. Kompleksitas regulasi yang lebih tinggi pada BUMN dibandingkan perusahaan swasta juga menjadi latar belakang penting dalam penelitian ini, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih spesifik terhadap pemahaman mengenai efektivitas tata kelola perusahaan dalam konteks Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki dua kebaruan (*novelty*). Pertama, menguji peran biaya audit sebagai variabel moderasi dalam hubungan di antara karakteristik dewan komisaris dengan indikasi kecurangan laporan keuangan. Kedua, fokus pada BUMN sebagai objek penelitian, yang memiliki karakteristik tata kelola perusahaan yang berbeda dan regulasi yang lebih ketat dari sektor swasta.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, dan frekuensi rapat dewan komisaris terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan, serta untuk menguji peran biaya audit dalam memoderasi hubungan tersebut pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019–2023.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Agensi

Teori agensi, sebagaimana dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976), menjelaskan hubungan kontraktual antara pemegang saham (prinsipal) dan manajemen (agen), di mana baik prinsipal maupun agen mengedepankan kepentingan yang tidak sejalan. Ketidaksejajaran kepentingan ini menciptakan potensi konflik, terutama ketika agen memiliki akses terhadap informasi yang lebih besar dibandingkan dengan prinsipal, sehingga menimbulkan masalah asimetri informasi. Dalam kondisi ini, agen memiliki insentif untuk bertindak oportunistik, seperti melakukan manipulasi atau kecurangan laporan keuangan guna memenuhi tujuan pribadi, sementara mengorbankan kepentingan pemegang saham.

Dalam konteks tata kelola perusahaan (*corporate governance*), teori agensi menawarkan

fondasi teoritis yang kuat untuk menjelaskan pentingnya mekanisme pengawasan. Tata kelola perusahaan, melalui keberadaan dewan komisaris dan auditor eksternal, bertindak sebagai perangkat pengendalian yang dirancang untuk mengurangi konflik kepentingan dan mengawasi perilaku agen. Mekanisme tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan tujuan perusahaan dan prinsip-prinsip akuntabilitas. Dengan demikian, teori agensi menjadi landasan utama dalam memahami bagaimana struktur dan proses tata kelola perusahaan yang efektif dapat menekan perilaku oportunistik dan meminimalkan risiko kecurangan laporan keuangan.

Selain itu, teori agensi juga memiliki keterbatasan ketika diterapkan dalam konteks Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Struktur kepemilikan BUMN yang mayoritas dimiliki oleh negara, menjadikan negara sebagai prinsipal kolektif yang diwakili oleh pejabat publik atau birokrat. Hal ini menciptakan apa yang disebut sebagai *multiple principal problem*, di mana banyaknya pemangku kepentingan negara dengan tujuan yang berbeda-beda justru memperburuk masalah agensi. Selain itu, kompleksitas birokrasi, intervensi politik, dan tujuan non-komersial yang melekat pada BUMN dapat mengurangi efektivitas mekanisme pengawasan tradisional yang diasumsikan dalam teori agensi. Dengan demikian, teori agensi tidak sepenuhnya mampu menjelaskan dinamika kecurangan dalam BUMN, karena perilaku manajerial di lingkungan tersebut dipengaruhi tidak hanya oleh motif keuntungan pribadi, tetapi juga oleh tekanan politik dan kepentingan institusional yang lebih luas.

Indikasi Kecurangan Laporan Keuangan

Kecurangan laporan keuangan merupakan isu serius yang dapat merusak kredibilitas dan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap suatu entitas. Dalam konteks ini, perusahaan dituntut untuk memiliki mekanisme pengawasan yang kuat guna meminimalisir indikasi terjadinya manipulasi informasi keuangan. Menurut *Association of Certified Fraud Examiner* (ACFE), kecurangan laporan keuangan terjadi ketika seseorang dengan sengaja memanipulasi informasi atau melakukan kelalaian yang signifikan dalam laporan keuangan sebuah organisasi (ACFE, 2024). Kecurangan laporan keuangan bukan hanya berdampak pada kerugian finansial bagi investor, tetapi juga merusak reputasi perusahaan dan menciptakan instabilitas di pasar. Perusahaan yang terindikasi melakukan kecurangan dapat mengalami penurunan nilai saham dan menghadapi sanksi hukum dan regulasi.

Tata Kelola Perusahaan

Suatu mekanisme yang berfungsi untuk mengatur serta mengawasi aktivitas entitas bisnis disebut sebagai tata kelola perusahaan (*corporate governance*) (Cadbury, 1992). Tujuan utama dari tata kelola perusahaan adalah menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Tata kelola perusahaan memiliki tiga dimensi penting, yaitu struktur kepemilikan, pengendalian perusahaan, dan struktur dewan komisaris. Struktur dewan komisaris mencakup komisaris independen, ukuran dewan komisaris, dan frekuensi rapat dewan komisaris. Sebagai organ pengawas tertinggi dalam struktur tata kelola perusahaan, dewan komisaris memiliki peran yang lebih luas dan strategis dalam mengawasi kebijakan perusahaan termasuk dalam mencegah indikasi kecurangan laporan keuangan.

Komisaris Independen

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014, komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen sesuai dengan peraturan OJK ini. Keberadaan komisaris independen menjadi elemen krusial dalam struktur tata kelola perusahaan, karena mereka bertugas mengawasi kebijakan manajemen secara objektif dan memastikan bahwa keputusan perusahaan dibuat untuk kepentingan pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya (Astami et al., 2024).

Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran dewan komisaris adalah total jumlah anggota dewan komisaris yang dilaporkan oleh perusahaan (Astami et al., 2024). Salah satu mekanisme utama dalam tata kelola perusahaan adalah ukuran dewan komisaris yang berperan dalam pengambilan keputusan, pengawasan, dan peningkatan kinerja perusahaan.

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Rapat dewan komisaris merupakan sarana pertemuan anggota dewan komisaris untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap manajemen (Prastiti, 2013). Frekuensi rapat yang rutin menunjukkan tingkat kepedulian dewan komisaris terhadap pengawasan perusahaan, terutama dalam memastikan transparansi dan akurasi informasi dalam laporan keuangan (Rostami & Rezaei, 2022), sehingga dapat mengurangi kasus kecurangan pada perusahaan.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Indikasi Kecurangan Laporan Keuangan

Didasarkan terhadap teori agensi terdapat upaya dalam memisahkan pengelolaan dan juga kepemilikan pada perusahaan yang seringkali memunculkan adanya konflik ataupun permasalahan dalam aspek kepentingan, karena manajemen (agen) dapat memiliki insentif untuk memprioritaskan kepentingan pribadinya daripada kepentingan pemilik (prinsipal) (Jensen & Meckling, 1976). Keberadaan dewan komisaris sebagai alat pemantauan yang efektif untuk mengurangi konflik tersebut dengan meningkatkan pengawasan terhadap manajemen, sehingga meminimalkan kemungkinan kecurangan laporan keuangan. Menurut teori agensi, dewan komisaris dapat mengawasi dengan efektif jika mereka bersifat independen dari manajemen (Christensen dkk., 2010; Fama & Jensen, 1983). Dalam hal ini, semakin besar persentase komisaris independen akan semakin efektif dalam mengontrol keputusan dan memantau aktivitas manajemen. Dengan pengawasan yang lebih ketat, komisaris independen diharapkan mampu menekan potensi terjadinya kecurangan laporan keuangan, karena dewan komisaris meminimalkan peluang manajemen untuk bertindak oportunistik yang berdampak merugikan pemegang saham. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kaituko dkk. (2023), Mousavi dkk. (2022), Popa Sabău dkk. (2024), dan Rostami & Rezaei (2022) menyampaikan adanya korelasi negatif antara kecurangan laporan keuangan dengan komisaris independen. Maka dari itu, telah diajukan hipotesis sebagai berikut:

H_1 : Komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan.

Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Indikasi Kecurangan Laporan Keuangan

Didasarkan terhadap teori agensi bahwa terdapat tanggung jawab yang dimiliki oleh dewan komisaris dalam melakukan pengawasan pada tindakan manajemen dengan tujuan untuk memprioritaskan kepentingan seorang pemilik (Jensen & Meckling, 1976). Ukuran yang dinilai lebih besar pada dewan komisaris memiliki nilai dan juga kapasitas yang tinggi dalam mengawasi dikarenakan terdapat aneka keahlian dan perspektif yang dapat mendukung pencegahan aktivitas dan pendeteksian kecurangan. Penelitian Arum dkk. (2023) menemukan bahwa dewan komisaris yang berukuran besar maka lebih efektif dalam mengawasi kinerja manajemen dan mengurangi risiko kecurangan laporan keuangan. Besarnya ukuran dewan komisaris juga memungkinkan adanya peningkatan keterlibatan anggota dewan komisaris dalam proses pengambilan keputusan, sehingga mampu menekan insentif bagi manajemen untuk bertindak oportunistik. Sejalan dengan temuan tersebut, penelitian Arum et al. (2023), Fathi (2013), dan Sadique et al. (2019) menunjukkan terdapat hubungan negatif antara ukuran dari dewan komisaris dengan kemungkinan terjadinya

kecurangan di dalam suatu perusahaan. Berdasarkan teori dan bukti empiris tersebut, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H_2 : Ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan.

Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Komisaris Terhadap Indikasi Kecurangan Laporan Keuangan

Prediksi di dalam frekuensi rapat dewan komisaris yang negatif pada indikasi kecurangan terhadap laporan keuangan. Dewan komisaris yang sering mengadakan rapat memungkinkan untuk lebih sering meninjau aktivitas perusahaan dan selalu mendapatkan informasi terbaru mengenai kinerja perusahaan (Sadique dkk., 2019). Menurut teori agensi, dewan komisaris yang aktif dengan frekuensi pertemuan rutin yang tinggi dapat mengumpulkan rekomendasi dan pandangan dari anggotanya untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas operasional perusahaan, yang dapat mengurangi potensi terjadinya kecurangan (Nguyen dkk., 2022). Marsha & Ghazali (2017) menyatakan bahwa semakin sering dewan komisaris mengadakan rapat maka dewan komisaris dapat lebih cepat merespons dan memberikan rekomendasi terkait cara mengatasi masalah-masalah penting yang muncul, terutama yang berhubungan dengan kualitas pelaporan keuangan. Selain itu, rapat dewan komisaris yang sering akan lebih efektif dalam menganalisis laporan keuangan, sehingga mampu mendeteksi potensi manipulasi atau kecurangan yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen. Temuan Kaituko et al. (2023), Nasir et al. (2019), Rostami & Rezaei (2022) dan Mousavi et al. (2022) bahwa terdapat korelasi negatif antara indikasi kecurangan laporan keuangan dan frekuensi rapat dewan komisaris, sehingga telah diajukan hipotesis sebagai berikut:

H_3 : Frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan.

Peran Biaya Audit dalam Memperkuat Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Indikasi Kecurangan Laporan Keuangan

Salah satu upaya dalam melakukan pengawasan yang cenderung efektif yakni dengan memprioritaskan terhadap penekanan perilaku opportunistik manajemen yang diindikasikan dapat memberikan kerugian terhadap para pemegang saham. Didasarkan kembali terhadap teori agensi, Jensen & Meckling (1976) memberikan penjelasan terkait biaya audit yang dijadikan sebagai biaya pengawasan yang ditanggung jawab oleh para pemegang saham dengan tujuan untuk memberikan kepastian terkait tindakan manajemen yang berjalan di garis kepentingan mereka. Efektivitas komisaris independen dalam menekan kecurangan laporan keuangan dapat lebih optimal ketika perusahaan mengalokasikan biaya audit yang memadai, karena biaya audit yang tinggi umumnya mencerminkan kualitas audit yang lebih baik, yang dapat mendukung tugas pengawasan komisaris independen terhadap manajemen. Penelitian Carcello dkk. (2002) mengungkapkan bahwa dewan komisaris yang lebih independen, tekun, dan berpengetahuan cenderung memilih audit berkualitas lebih tinggi dan bersedia membayar biaya audit yang lebih besar agar dapat mendeteksi adanya indikasi kecurangan laporan keuangan, sebagaimana ditunjukkan oleh adanya korelasi positif antara biaya audit dan struktur dewan komisaris terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan. Berdasarkan argumen tersebut, biaya audit yang lebih tinggi diprediksi akan memperkuat pengaruh komisaris independen dalam mengurangi kecurangan laporan keuangan. Oleh karena itu, diajukan hipotesis:

H_4 : Biaya audit memperkuat pengaruh komisaris independen terhadap penurunan indikasi kecurangan laporan keuangan.

Peran Biaya Audit dalam Memperkuat Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Indikasi Kecurangan Laporan Keuangan

Didasarkan terhadap teori agensi, ukuran dewan komisaris yang lebih besar diharapkan meningkatkan efektivitas pengawasan karena banyaknya anggota memungkinkan adanya

keragaman perspektif dan distribusi tugas yang lebih optimal dalam mengawasi potensi penyimpangan manajemen (Jensen & Meckling, 1976). Namun, efektivitas tersebut tidak sepenuhnya dijamin hanya oleh ukuran dewan itu sendiri, karena dewan yang besar tanpa dukungan informasi audit yang berkualitas berisiko menghadapi koordinasi yang lemah dan ketidakjelasan tanggung jawab, yang justru dapat memperburuk pengawasan. Dalam hal ini, biaya audit berperan sebagai faktor pendukung yang dapat memperkuat pengaruh positif ukuran dewan terhadap pengendalian kecurangan. Biaya audit yang tinggi menunjukkan adanya audit eksternal yang lebih ketat dan menyeluruh, sehingga membantu dewan komisaris, terutama dalam struktur yang besar, untuk mengidentifikasi dan menindaklanjuti potensi kecurangan secara lebih efektif (Eriabie & Dabor, 2017). Oleh karena itu, diajukan hipotesis:

H_5 : Biaya audit memperkuat pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap penurunan indikasi kecurangan laporan keuangan.

Peran Biaya Audit dalam Memperkuat Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Komisaris Terhadap Indikasi Kecurangan Laporan Keuangan

Dalam perspektif teori agensi, intensitas pengawasan dewan komisaris tercermin dari frekuensi rapat yang dilaksanakan untuk mengevaluasi dan memitigasi risiko kecurangan laporan keuangan (Jensen & Meckling, 1976). Namun, efektivitas rapat tersebut sangat dipengaruhi oleh kualitas informasi yang tersedia, di mana biaya audit berperan penting sebagai indikator yang mencerminkan tingkat ketelitian dan kredibilitas audit eksternal. Biaya audit yang lebih tinggi memungkinkan auditor melakukan prosedur pemeriksaan yang lebih mendalam, sehingga menghasilkan temuan yang lebih akurat dan relevan (Kantudu & Samaila, 2015), untuk mendukung fungsi pengawasan komisaris. Interaksi antara frekuensi rapat dan biaya audit menjadi krusial, karena rapat yang rutin tanpa dukungan informasi audit berkualitas berisiko hanya menjadi formalitas, sementara audit berkualitas tanpa pembahasan yang memadai dalam rapat juga mengurangi efektivitas pengawasan. Oleh karena itu, biaya audit yang tinggi memperkuat pengaruh frekuensi rapat dewan komisaris dalam mendeteksi dan menekan indikasi kecurangan laporan keuangan. Dengan mempertimbangkan interaksi tersebut, hipotesis yang diajukan adalah:

H_6 : Biaya audit memperkuat pengaruh frekuensi rapat dewan komisaris terhadap penurunan indikasi kecurangan laporan keuangan.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Keseluruhan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) digunakan di dalam penelitian ini sebagai populasi, dimana BUMN telah terdaftar sejak periode 2019-2023 pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Di samping itu, digunakan metode *purposive sampling* guna memilih sampel berdasarkan sejumlah pertimbangan tertentu sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Sampel Penelitian

No.	Kriteria Pemilihan	Jumlah
1.	Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.	24
2.	Perusahaan BUMN keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.	(4)
3.	Perusahaan BUMN nonkeuangan yang memiliki <i>annual report</i> tanpa pemaparan informasi secara menyeluruh mengenai data yang diperlukan untuk mengukur komponen variabel selama lima tahun periode pengamatan.	-
Total sampel perusahaan yang diteliti		20
Total data pengamatan selama 5 tahun		100

Sumber: Data diolah, 2025

Jenis dan Sumber Data

Studi ini menerapkan metode pendekatan kuantitatif karena ditujukan untuk mengkaji peran dari variabel moderasi yaitu biaya audit serta karakteristik dari dewan komisaris yang terdiri dari independensi, ukuran serta frekuensi rapat terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan pada perusahaan BUMN yang tercatat di BEI selama periode 2019–2023. Desain penelitian yang digunakan adalah longitudinal, karena data dikumpulkan dari periode waktu tertentu secara berturut-turut untuk mengamati perubahan yang terjadi dari tahun ke tahun. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan melalui situs resmi BEI (www.idx.co.id) serta data tambahan untuk komponen dalam pengukuran M-Score bersumber dari Bloomberg.

Variabel Penelitian dan Pengukuran

Penelitian ini memanfaatkan variabel dependen yakni terkait indikasi kecurangan laporan keuangan, dengan melakukan pengukuran khususnya dengan model Beneish M-Score yang berguna untuk mendeteksi terjadinya indikasi kecurangan laporan keuangan. Berdasarkan model M-Score, variabel indikasi kecurangan laporan keuangan merupakan variabel dummy, di mana nilai M-Score antara sama dengan atau berada di bawah ambang batas -2,22 diberi nilai 0 bagi perusahaan yang tidak melakukan indikasi kecurangan laporan keuangan, sedangkan nilai M-Score yang lebih besar dari -2,22 diberi nilai 1 bagi perusahaan yang terindikasi kecurangan laporan keuangan. Adapun rumus campuran yang terdiri dari delapan indeks ialah sebagai berikut:

Tabel 2. Pengukuran M-Score

Indeks	Perhitungan
1. Days' Sales in Receivables Index (DSRI)	$DSRI = \frac{CY\ Receivables / CY\ Sales}{PY\ Receivables / PY\ Sales}$
2. Gross Margin Index (GMI)	$GMI = \frac{(PY\ Sales - PY\ Cost\ of\ Goods\ Sold) / PY\ Sales}{(CY\ Sales - CY\ Cost\ of\ Goods\ Sold) / CY\ Sales}$
3. Asset Quality Index (AQI)	$AQI = \frac{CY\ Total\ Assets - CY\ Current\ Assets - CY\ PP\&E}{PY\ Total\ Assets - PY\ Current\ Assets - PY\ PP\&E}$
4. Sales Growth Index (SGI)	$SGI = \frac{CY\ Sales}{PY\ Sales}$
5. Depreciation Index (DEPI)	$DEPI = \frac{PY\ Depreciation / (PY\ Depreciation + PY\ PP\&E)}{CY\ Depreciation / (CY\ Depreciation + CY\ PP\&E)}$
6. Sales, General, and Administrative Expense Index (SGAI)	$SGAI = \frac{CY\ SG\&A\ Expense / CY\ Sales}{PY\ SG\&A\ Expense / PY\ Sales}$
7. Leverage Index (LVGI)	$LVGI = \frac{(CY\ LTD + CY\ Current\ Liabilities) / CY\ Total\ Assets}{(PY\ LTD + PY\ Current\ Liabilities) / PY\ Total\ Assets}$
8. Total Accruals to Total Assets (TATA)	$TATA = \frac{\Delta Working\ Capital - \Delta Cash - \Delta Income\ Taxes\ Payable - CY\ Depreciation\ and\ Amortization}{CY\ Total\ Assets}$

Sumber: Chapman (2022)

Rumus M-Score dari delapan indeks tersebut ialah seperti di bawah ini:

$$M = -4,84 + 0,920 \times DSRI + 0,528 \times GMI + 0,404 \times AQI + 0,892 \times SGI + 0,115 \times DEPI - 0,172 \times SGAI + 4,679 \times TATA - 0,327 \times LVGI$$

Penelitian ini terdapat variabel independen (X) yang terdiri dari komisaris independen (X_1), ukuran dewan komisaris (X_2), dan frekuensi rapat dewan komisaris (X_3). Pengukuran komisaris independen berdasarkan proporsi antara jumlah komisaris independen dibagi dengan total keseluruhan anggota dewan komisaris (Abdul Gafoor dkk., 2018; Rostami & Rezaei, 2022). Pengukuran yang dilakukan terhadap dewan komisaris didasarkan terhadap jumlah total dari anggota dewan komisaris di dalam suatu perusahaan (El-Chaarani dkk., 2022). Pengukuran frekuensi rapat dengan komisaris didasarkan terhadap jumlah keseluruhan rapat yang telah diselenggarakan oleh dewan komisaris di dalam jangka waktu satu tahun (Kaituko dkk., 2023; Mousavi dkk., 2022). Selain itu, dalam penelitian ini terdapat variabel moderasi (Z) ialah biaya audit. Pengukuran biaya audit menggunakan logaritma natural dari total biaya audit (Kaituko dkk., 2023). Seluruh data tersebut diidentifikasi adanya data *outlier* menggunakan *boxplot*, ditemukan 4 data yang ekstrem dan harus dikeluarkan dari sampel. Setelah dilakukan *outlier* tersisa 96 data yang akan dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif, analisis regresi logistik, dan pengujian hipotesis menggunakan software SPSS 26.

HASIL

Statistik Deskriptif

Tabel 3. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.Deviation
BIND	96	5.91282	16.51170	10.0665467	2.65081203
BSIZE	96	3	9	5.43	1.367
BMEET	96	5	32	14.25	4.722
AF	96	340000000	59700000000	5252913688	1.077E+10
Valid N (listwise)	96				

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 2, pengukuran memanfaatkan proporsi total komisaris independen terhadap jumlah keseluruhan anggota dewan komisaris yang mempunyai nilai minimal sebesar 5,912 dan maksimal sebesar 16,511. Rata-rata nilai variabel ini adalah 10,066, yang menunjukkan bahwa secara umum, anggota komisaris independen di dalam suatu perusahaan berjumlah sekitar 10,7%. Variabel ukuran dewan komisaris (BSIZE), melakukan perhitungan dengan didasarkan terhadap jumlah keseluruhan anggota dewan komisaris dengan nilai minimum 3 dan nilai maksimum 9, disertai rata-rata dengan besaran 5,43. Di dalam hal ini dilakukan pengindikasian terhadap total keseluruhan anggota dewan komisaris dalam sampel penelitian berkisar antara 3 hingga 9 orang, dengan mayoritas perusahaan memiliki sekitar 5 hingga 6 anggota.

Selanjutnya, variabel frekuensi rapat dewan komisaris (BMEET), yang dihitung berdasarkan jumlah rapat yang diselenggarakan dalam satu tahun, memiliki frekuensi terendah sebanyak 5 kali dan tertinggi mencapai 32 kali. Rata-rata pertemuan yang dilakukan adalah 14,25 kali per tahun, menunjukkan bahwa dewan komisaris pada perusahaan sampel umumnya mengadakan rapat sekitar 14 kali dalam satu tahun. Sementara itu, biaya audit digunakan sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini, yang diukur berdasarkan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk jasa audit, mempunyai nilai minimum sebesar Rp340 juta dan maksimum mencapai Rp59,7 miliar. Nilai rata-ratanya sebesar Rp5,252 miliar, yang menunjukkan bahwa secara umum entitas dalam sampel membayar sekitar Rp5,252 miliar untuk jasa audit laporan keuangan.

Analisis Regresi Logistik

Tabel 4. Uji Kelayakan Model (*Goodness of Fit Test*)

Hosmer and Lemeshow Test			
Step	Chi-square	df	Sig.
1	11.171	8	0.192

Sumber: Data diolah, 2025

Pengujian kelayakan model dianalisis melalui hasil output pada uji Hosmer dan Lemeshow yang diukur berdasarkan nilai *Chi-square*. Data dikatakan baik jika nilai signifikansi *Hosmer and Lemeshow Test* > 0,05. Berdasarkan tabel 3 diperoleh nilai *Chi-square* sebesar 11,171 dengan signifikansi sebesar 0,192 yang berarti bahwa nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05 ($0,192 > 0,05$), dapat ditarik kesimpulan bahwa diterimanya hipotesis nol dan ditunjukkan bahwa model fit dengan data atau tidak menunjukkan adanya perbedaan yang mencolok antar variabel, sehingga dapat diprediksi terkait nilai observasi yang diperoleh.

Tabel 5. Uji Kelayakan Keseluruhan Model (*Overall Fit Model Test*)

Iteration History a,b,c,d									
Iteration		-2 Log likelihood	Constant	BIND	BSIZE	BMEET	BIND*AF	BSIZE*AF	BMEET*AF
Step 1	1	107.828	1.507	2.284	1.789	-2.354	-0.102	-0.095	0.104
	2	107.048	2.219	2.763	2.274	-2.963	-0.124	-0.122	0.131
	3	107.042	2.306	2.812	2.313	-3.025	-0.126	-0.124	0.133
	4	107.042	2.307	2.812	2.314	-3.026	-0.126	-0.124	0.133

Keterangan: Initial -2 Log likelihood = 122.211

Sumber: Data diolah, 2025

Uji kelayakan keseluruhan model (*overall fit model test*) dapat dilakukan dengan membandingkan antara nilai awal -2 Log likelihood (blok number = 0) dengan nilai akhir -2 Log likelihood (blok number = 1). Jika nilai awal -2 Log likelihood lebih besar daripada nilai akhir -2 Log likelihood, maka terjadi penurunan hasil yang menunjukkan bahwa model regresi yang semakin baik. Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai awal -2 Log likelihood adalah 122,211 (sebelum memasukkan variabel), namun setelah iterasi ke-4 nilai akhir -2 Log likelihood turun menjadi 107,042. Penurunan yang terjadi dikarenakan model yang dilakukan estimasi dinilai semakin baik dalam memberikan penjelasan terkait korelasi antara variabel independen dan dependen. Semakin kecil nilai akhir -2 Log likelihood, semakin baik model dalam memprediksi data.

Tabel 6. Uji Koefisien Determinasi (Cox and Snell's R Square & Nagelkerke's R Square)

Model Summary			
Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	107.042	0.146	0.203

Sumber: Data diolah, 2025

Nilai *Nagelkerke R Square* mengindikasikan seberapa besar variabel independen (X) dapat memengaruhi variabel dependen (Y). Tabel 5 menunjukkan nilai *Nagelkerke R Square* sebesar 0,203 maka dapat disimpulkan bahwa besaran pengaruh dari variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) sebesar 20,3%.

Pengujian Hipotesis

Tabel 7. Uji Wald (Uji Parsial t)

		Variables in the Equation					
		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1	BIND	2.812	1.122	6.284	1	0.012	16.649
	BSIZE	2.314	2.470	0.877	1	0.349	10.111
	BMEET	-3.026	1.152	6.899	1	0.009	0.049
	BIND*AF	-0.126	0.051	6.114	1	0.013	0.882
	BSIZE*AF	-0.124	0.114	1.176	1	0.278	0.883
	BMEET*AF	0.133	0.052	6.613	1	0.010	1.143
	Constant	2.307	2.304	1.002	1	0.317	10.045

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 7, diperoleh hasil persamaan regresi sebagai berikut:

$$FSF = 2,307 + 2,812 \text{ BIND} + 2,314 \text{ BSIZE} - 3,026 \text{ BMEET} - 0,126 \text{ BIND*AF} - 0,124 \text{ BSIZE*AF} + 0,133 \text{ BMEET*AF}$$

Berikut merupakan interpretasi dari hasil persamaan regresi tersebut:

1. Nilai signifikansi variabel komisaris independen (BIND) ialah 0,012 itu berarti $0,012 < 0,05$ maka berkesimpulan komisaris independen berpengaruh terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan. Nilai koefisien BIND bernilai positif sebesar 2,812 yang berarti semakin meningkat proporsi komisaris independen, maka kecenderungan kecurangan dalam laporan keuangan juga semakin meningkat. Berdasarkan hasil ini, maka hipotesis pertama ditolak karena pengaruhnya bersifat positif.
2. Nilai signifikansi variabel ukuran dewan komisaris (BSIZE) ialah 0,349 itu berarti $0,349 > 0,05$ maka berkesimpulan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan. Untuk itu, hipotesis kedua ditolak.
3. Nilai signifikansi variabel frekuensi rapat komisaris (BMEET) sebesar 0,009 yang berarti $0,009 < 0,05$ maka berkesimpulan frekuensi rapat komisaris berpengaruh terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan. Nilai koefisien BMEET bernilai negatif sebesar -3,026 yang berarti bahwa semakin sering rapat dewan komisaris diadakan, semakin rendah kemungkinan terjadinya kecurangan laporan keuangan. Untuk itu, hipotesis ketiga diterima karena pengaruhnya bersifat negatif sehingga dapat menurunkan risiko kecurangan.
4. Nilai signifikansi variabel interaksi antara komisaris independen (BIND) dengan biaya audit (AF) sebesar 0,013 yang berarti $0,013 < 0,05$ maka berkesimpulan variabel biaya audit mampu memoderasi pengaruh variabel komisaris independen terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan. Nilai koefisien bernilai negatif sebesar -0,126 yang berarti bahwa biaya audit memperlemah pengaruh komisaris independen terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan. Untuk itu, hipotesis keempat ditolak.
5. Nilai signifikansi variabel interaksi antara ukuran dewan komisaris (BSIZE) dengan biaya audit (AF) sebesar 0,278 yang berarti $0,278 > 0,05$ maka berkesimpulan variabel biaya audit tidak mampu memoderasi pengaruh variabel ukuran dewan komisaris terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan. Untuk itu, hipotesis kelima ditolak.
6. Nilai signifikansi variabel interaksi antara frekuensi dewan komisaris (BMEET) dengan biaya audit (AF) sebesar 0,010 yang berarti $0,010 < 0,05$ maka berkesimpulan variabel biaya audit mampu memoderasi pengaruh variabel frekuensi dewan komisaris terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan. Nilai koefisien bernilai positif sebesar 0,133 yang berarti bahwa biaya audit memperkuat pengaruh frekuensi rapat dewan komisaris dalam menekan potensi terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan. Merujuk pada temuan ini, maka hipotesis keenam diterima.

Berdasarkan Tabel 7, interpretasi koefisien odds ratio ialah sebagai berikut:

1. Koefisien odds ratio (Exp(B)) sebesar 16,649 dan signifikan pada tingkat signifikansi 5% ($p = 0,012$) menunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi komisaris independen, maka peluang terjadinya indikasi kecurangan laporan keuangan justru meningkat sebesar 16,649 kali dibandingkan BUMN dengan komisaris independen yang lebih rendah. Hasil ini mengindikasikan bahwa keberadaan komisaris independen belum tentu efektif dalam mencegah indikasi kecurangan di lingkungan BUMN.
2. Koefisien odds ratio sebesar 10,111 menunjukkan bahwa semakin besar jumlah dewan komisaris, peluang terjadinya indikasi kecurangan meningkat 10,111 kali lipat bila dibandingkan BUMN yang memiliki jumlah anggota dewan komisaris relatif kecil. Namun demikian, temuan ini tidak signifikan secara statistik ($p = 0,349$), sehingga tidak cukup bukti untuk menyimpulkan adanya pengaruh nyata.
3. Koefisien odds ratio sebesar 0,049 dengan signifikansi kuat ($p = 0,009$) menunjukkan bahwa semakin sering frekuensi rapat dewan komisaris, maka peluang indikasi kecurangan laporan keuangan menurun drastis. Tepatnya, frekuensi rapat yang lebih sering menurunkan peluang kecurangan sebesar sekitar 95,1% ($1 - 0,049$) dibandingkan frekuensi rapat yang lebih jarang. Ini membuktikan bahwa intensitas pengawasan aktif melalui rapat dewan komisaris efektif dalam mengurangi peluang terjadinya indikasi kecurangan laporan keuangan.
4. Interaksi antara komisaris independen dan biaya audit menghasilkan koefisien odds ratio sebesar 0,882 ($p = 0,013$). Artinya, biaya audit yang lebih tinggi mampu melemahkan pengaruh negatif komisaris independen terhadap kecurangan. Setiap peningkatan interaksi ini dapat menurunkan peluang kecurangan sekitar 11,8% ($1 - 0,882$), sehingga biaya audit berperan sebagai faktor pengawasan tambahan untuk memperbaiki efektivitas komisaris independen.
5. Interaksi ukuran dewan komisaris dengan biaya audit menghasilkan koefisien odds ratio sebesar 0,883. Ini menunjukkan bahwa biaya audit yang lebih tinggi juga cenderung melemahkan pengaruh negatif ukuran dewan komisaris terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan, dengan peluang menurun sekitar 11,7% ($1 - 0,883$). Namun, hasil ini tidak signifikan ($p = 0,278$), sehingga pengaruh moderasi ini belum dapat dikatakan kuat berdasarkan data yang ada.
6. Interaksi frekuensi rapat dewan komisaris dengan biaya audit menghasilkan koefisien odds ratio sebesar 1,143 ($p = 0,010$). Ini berarti bahwa adanya biaya audit yang tinggi justru memperkuat hubungan frekuensi rapat dewan komisaris dengan indikasi kecurangan, dengan peluang meningkatkan sekitar 14,3% ($1,143 > 1$). Artinya, biaya audit memperkuat hubungan antara frekuensi rapat dewan komisaris dan indikasi kecurangan laporan keuangan, tetapi arah penguatannya justru sedikit meningkatkan pada peluang terjadinya indikasi kecurangan.

Tabel 8. Uji Omnibus Tests of Model Coefficients (Uji Simultan F)

Omnibus Tests of Model Coefficients					
		Chi-square	df		Sig.
Step 1	Step	15.169	6		0.019
	Block	15.169	6		0.019
	Model	15.169	6		0.019

Sumber: Data diolah, 2025

Pengujian *Omnibus Tests of Model Coefficients* atau uji simultan F dilakukan dengan melihat angka signifikansi apakah lebih dari atau kurang dari tingkat signifikansi yaitu 0,05. Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,019 yang berarti $0,019 < 0,05$ Maka dapat disimpulkan terkait keseluruhan variabel independen memiliki pengaruh yang simultan terhadap variabel dependen.

PEMBAHASAN

Komisaris Independen Berpengaruh Negatif Terhadap Indikasi Kecurangan Laporan Keuangan

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa komisaris independen justru berpengaruh positif terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan, sehingga hipotesis pertama ditolak dan tidak mendukung asumsi teori agensi yang menekankan peran komisaris independen sebagai pengawas objektif untuk melindungi kepentingan pemegang saham serta menekan perilaku oportunistik manajemen (Jensen & Meckling, 1976). Temuan ini mengindikasikan bahwa keberadaan komisaris independen dalam konteks penelitian ini belum mampu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif, bahkan justru terkait dengan meningkatnya indikasi kecurangan. Temuan ini konsisten dengan studi yang dilakukan oleh Koolivand et al. (2023) yang mengungkapkan bahwa dalam beberapa kondisi, komisaris independen hanya berperan secara formalitas tanpa keterlibatan nyata dalam pengawasan substansial, sehingga membuka peluang bagi manajer untuk melakukan tindakan kecurangan. Hal ini memperlihatkan bahwa sekadar adanya status "independen" tidak serta-merta menjamin integritas dan efektivitas pengawasan, terutama jika tidak disertai kompetensi, pengalaman, serta independensi yang sesungguhnya dari pengaruh internal perusahaan. Temuan ini bertolak belakang dengan hasil A. Girau et al. (2022) dan Mukhibad et al. (2021) yang menyatakan tidak menemukan hubungan di antara keberadaan komisaris independen dengan potensi kecurangan, serta bertentangan pada studi Kaituko et al. (2023), Popa Sabău et al. (2024), Rostami & Rezaei (2022), dan juga Mousavi et al. (2022) yang menunjukkan bahwa komisaris independen efektif dalam mengurangi indikasi kecurangan karena kemampuannya dalam mengawasi manajemen secara ketat dan objektif.

Ukuran Dewan Komisaris Berpengaruh Negatif Terhadap Indikasi Kecurangan Laporan Keuangan

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap potensi kecurangan di dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, hipotesis kedua tidak dapat diterima atau ditolak dan berlawanan dengan pandangan teori agensi, yang beranggapan bahwa semakin besar ukuran dewan komisaris, semakin kuat pula fungsi pengawasan terhadap manajemen dalam membatasi perilaku oportunistik (Jensen & Meckling, 1976). Temuan ini mengindikasikan bahwa besarnya jumlah anggota dewan komisaris tidak secara otomatis meningkatkan efektivitas pengawasan, kemungkinan karena adanya persoalan koordinasi, perbedaan pendapat, kurangnya partisipasi aktif, atau keterbatasan kompetensi antaranggota, sehingga kemampuan kolektif dalam melakukan pengawasan tidak mencapai tingkat efektivitas yang maksimal. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mukhibad et al. (2021) dan Uwuigbe et al. (2019) yang menemukan bahwa ukuran dewan komisaris yang lebih besar tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan, bahkan berpotensi memperlambat proses pengambilan keputusan dan melemahkan pengawasan. Sebaliknya, temuan ini bertentangan dengan studi Arum et al. (2023), Fathi (2013), dan Sadique et al. (2019) yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan dewan komisaris berukuran besar lebih mampu menekan kecurangan karena pengawasan yang lebih ketat terhadap laporan keuangan. Selain itu, temuan ini tidak sejalan dengan studi A. Girau et al. (2022) yang mengungkapkan bahwa peningkatan jumlah anggota dewan komisaris dapat memperbesar potensi terjadinya kecurangan karena kurangnya efektivitas dalam koordinasi serta proses pengambilan keputusan.

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris Berpengaruh Negatif Terhadap Indikasi Kecurangan Laporan Keuangan

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa frekuensi rapat dewan komisaris berkorelasi negatif terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan. Didasarkan temuan ini, dinyatakan hipotesis ketiga diterima dan mendukung teori agensi yang menekankan pentingnya intensitas pengawasan dewan dalam meminimalisir perilaku oportunistik manajemen (Jensen &

Meckling, 1976). Temuan ini memperkuat pandangan bahwa semakin sering dewan komisaris mengadakan rapat, semakin intensif evaluasi terhadap kebijakan manajemen, pengawasan terhadap potensi penyimpangan, dan implementasi langkah pengendalian, sehingga ruang gerak dalam berbuat kecurangan laporan keuangan menjadi semakin terbatas. Secara empiris, hasil ini konsisten dengan penelitian Kaituko et al. (2023), Nasir et al. (2019), Rostami & Rezaei (2022) dan Mousavi et al. (2022), mereka sama-sama menemukan bahwa tingginya frekuensi rapat dewan komisaris berkontribusi pada penurunan indikasi kecurangan, karena memperkuat efektivitas fungsi monitoring. Namun demikian, hasil ini juga perlu dikritisi dengan mempertimbangkan temuan Maharani & Ainiyah (2022) yang mengindikasikan bahwa frekuensi rapat yang tinggi bisa menjadi tanda dari permasalahan serius dalam perusahaan, yang justru berpotensi memperbesar risiko kecurangan, serta studi A. Girau et al. (2022) menemukan frekuensi rapat tidak signifikan memengaruhi terjadinya kecurangan, menunjukkan bahwa efektivitas rapat sebagai mekanisme pengawasan sangat bergantung pada kualitas substansi rapat, bukan sekadar pada jumlahnya.

Biaya Audit Memperkuat Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Penurunan Indikasi Kecurangan Laporan Keuangan

Hasil pengujian hipotesis keempat menyatakan bahwa biaya audit memperkuat pengaruh komisaris independen terhadap penurunan indikasi kecurangan laporan keuangan. Berdasarkan hasil analisis data, hipotesis keempat ditolak karena biaya audit diketahui memperlemah pengaruh komisaris independen terhadap penurunan indikasi kecurangan laporan keuangan. Temuan ini tidak selaras dengan asumsi dasar teori agensi yang menyatakan bahwa keberadaan komisaris independen dan kualitas audit yang tinggi diwakili oleh besarnya biaya audit seharusnya saling memperkuat dalam menekan perilaku oportunistik manajemen (Jensen & Meckling, 1976). Sebaliknya, temuan ini mengindikasikan peran pengawasan komisaris independen justru menjadi kurang efektif ketika perusahaan membayar biaya audit tinggi, karena pengawasan dianggap telah dialihkan atau disubstitusikan kepada auditor eksternal. Dalam konteks BUMN, kemungkinan lain adalah bahwa tingginya biaya audit tidak selalu mencerminkan kualitas audit, melainkan dipengaruhi oleh faktor birokratis atau regulatif, yang justru mengaburkan fungsi akuntabilitas dan independensi auditor. Temuan ini mendukung penelitian Donatella et al. (2019) yang menunjukkan bahwa biaya audit tinggi bukan jaminan kualitas audit tinggi, dan dalam beberapa kasus justru mengindikasikan adanya *ineffective audit oversight*, sehingga bisa memperlemah pengaruh pengawasan komisaris independen dan meningkatkan kemungkinan manajemen laba. Di sisi lain, hasil ini bertentangan dengan studi Onalapo et al. (2017) yang menyatakan bahwa biaya audit yang tinggi mencerminkan kualitas audit yang baik, sehingga memperkuat pengawasan dan mendukung efektivitas komisaris independen.

Biaya Audit Memperkuat Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Penurunan Indikasi Kecurangan Laporan Keuangan

Hasil pengujian menunjukkan bahwa biaya audit tidak mampu memoderasi secara signifikan pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan, meskipun arah interaksi menunjukkan pelemahan, sehingga hipotesis ditolak. Temuan ini tidak mendukung teori agensi oleh Jensen & Meckling (1976) yang menyatakan bahwa pengawasan internal yang kuat melalui dewan berukuran besar akan semakin efektif apabila diperkuat dengan pengawasan eksternal yang berkualitas seperti audit dengan biaya tinggi. Kegagalan moderasi ini menunjukkan bahwa kuantitas dewan tidak menjamin efektivitas pengawasan, terutama bila diwarnai dengan konflik, lemahnya koordinasi, dan partisipasi yang rendah, sebagaimana dikemukakan oleh Mukhibad et al. (2021) dan Uwuigbe et al. (2019). Selain itu, tidak semua biaya audit mencerminkan kualitas audit yang sesungguhnya, seperti ditemukan oleh Krauß et al. (2015) dan Donatella et al. (2019), sehingga ketika audit tidak substantif atau bersifat administratif, maka

sinergi dengan pengawasan dewan pun tidak tercapai. Oleh karena itu, hasil ini menegaskan bahwa keberhasilan tata kelola perusahaan tidak hanya bergantung pada struktur formal seperti jumlah dewan komisaris atau besarnya biaya audit saja, tetapi pada kualitas substantif pengawasan dan profesionalisme pelaku tata kelola perusahaan itu sendiri.

Biaya Audit Memperkuat Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Komisaris Terhadap Penurunan Indikasi Kecurangan Laporan Keuangan

Temuan analisis mengindikasikan bahwa biaya audit mampu memperkuat pengaruh frekuensi rapat dewan komisaris terhadap penurunan indikasi kecurangan laporan keuangan, sehingga hipotesis diterima. Temuan ini mendukung teori agensi yang menyatakan bahwa intensitas pengawasan, melalui frekuensi rapat yang tinggi, dapat membatasi perilaku oportunistik manajemen, terlebih bila diperkuat oleh keberadaan auditor eksternal yang berkualitas yang tercermin dari besarnya biaya audit. Ketika dewan komisaris aktif melakukan rapat dan didukung audit yang andal, sinergi antara pengawasan internal dan eksternal pun terbangun, sehingga integritas pelaporan meningkat. Temuan ini konsisten dengan penelitian [Eriabie & Dabor \(2017\)](#) yang menemukan bahwa dewan yang aktif didampingi auditor berkualitas tinggi mampu menekan praktik manajemen laba. Namun, hasil ini berbeda dari [Maharani & Ainiyah \(2022\)](#) yang menekankan bahwa frekuensi rapat saja tidak cukup efektif, karena kualitas diskusi dan keputusan dalam rapat jauh lebih menentukan dalam menekan kecurangan. Hal ini mengindikasikan bahwa frekuensi rapat dewan komisaris akan efektif dalam mencegah kecurangan hanya jika rapat tersebut bersifat substantif dan mendapat dukungan dari proses audit eksternal yang berkualitas.

KESIMPULAN

Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini yakni untuk melakukan pengujian terhadap peran biaya audit yang memoderasi tata kelola perusahaan yang mencakup karakteristik dewan komisaris yaitu independensi, ukuran, serta frekuensi rapat terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan tepatnya pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di negara Indonesia. Berdasarkan hasil temuan menunjukkan bahwa dari seluruh aspek tata kelola perusahaan yang diuji, hanya satu variabel independen yaitu frekuensi rapat dewan komisaris yang mempunyai pengaruh negatif terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan, sementara komisaris independen berpengaruh positif dan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh. Selain itu, peran moderasi biaya audit memperkuat frekuensi rapat dewan komisaris terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan, tetapi justru melemahkan pengaruh variabel komisaris independen. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan frekuensi rapat dewan komisaris dapat menjadi mekanisme efektif dalam mengurangi indikasi kecurangan laporan keuangan, terutama ketika biaya audit yang dibayarkan lebih tinggi.

SARAN

1. Saran Praktis: Perusahaan BUMN disarankan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dengan memperbanyak dan meningkatkan kualitas rapat dewan komisaris guna memastikan kepatuhan terhadap tata kelola perusahaan yang baik. Selain itu, regulator perlu memperkuat pedoman tata kelola yang menekankan pentingnya frekuensi rapat dewan komisaris serta transparansi dalam pembayaran biaya audit untuk meningkatkan akuntabilitas. Investor dan pemangku kepentingan lainnya juga perlu mempertimbangkan aspek frekuensi rapat dewan komisaris dan kebijakan biaya audit dalam menilai risiko kecurangan laporan keuangan sebelum mengambil keputusan investasi.

2. Saran Teoritis: Keterbatasan masih ditemukan di dalam penelitian ini terutama dalam mencakup variabel dan juga metode analisis. Maka dari itu, sangat diharapkan dan disarankan untuk penelitian berikutnya dalam memberikan penambahan terkait variabel dalam tata kelola perusahaan lainnya. Beberapa diantaranya yakni seperti efektivitas kualitas auditor eksternal, efektivitas komite audit, dan juga kepemilikan institusional dalam memperoleh pemahaman agar dapat mencapai konferensi dan kompleksitas terutama terkait mekanisme pengelolaan perusahaan untuk meminimalisir indikasi kecurangan pada laporan keuangan. Selain itu, pendekatan penelitian kualitatif melalui studi kasus atau wawancara dengan auditor dan dewan komisaris dapat digunakan untuk menggali lebih dalam faktor-faktor yang memengaruhi pengawasan terhadap kecurangan. Terakhir, memperluas cakupan penelitian ke sektor swasta atau BUMN di industri yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi, seperti perbankan atau pertambangan, agar memperoleh wawasan yang lebih luas mengenai efektivitas tata kelola perusahaan dalam berbagai konteks regulasi dan operasional.

REFERENSI

- A. Girau, E., Bujang, I., Paulus Jidwin, A., & Said, J. (2022). Corporate governance challenges and opportunities in mitigating corporate fraud in Malaysia. *Journal of Financial Crime*, 29(2), 620–638. <https://doi.org/10.1108/JFC-02-2021-0045>
- Abdul Gafoor, C. P., Mariappan, V., & Thiagarajan, S. (2018). Board characteristics and bank performance in India. *IIMB Management Review*, 30(2), 160–167. <https://doi.org/10.1016/j.iimb.2018.01.007>
- ACFE. (2024). *THE NATIONS® OCCUPATIONAL FRAUD 2024: 2 FOREWORD Occupational Fraud 2024: A Report to the Nations*.
- ACFE Indonesia. (2019). *Suvei Fraud Indonesia*.
- Arum, E. D. P., Wijaya, R., Wahyudi, I., & Brilliant, A. B. (2023). Corporate Governance and Financial Statement Fraud during the COVID-19: Study of Companies under Special Monitoring in Indonesia. *Journal of Risk and Financial Management*, 16(7). <https://doi.org/10.3390/jrfm16070318>
- Astami, E., Pramono, A. J., Rusmin, R., Cahaya, F. R., & Soobaroyen, T. (2024). Do family ownership and supervisory board characteristics influence audit report lag? A view from a two-tier board context. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 56(June), 100638. <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2024.100638>
- Cadbury, C. (1992). *Report of the committee on the financial aspects of corporate governance*.
- Carcello, J. V., Hermanson, D. R., Neal, T. L., & Riley, R. A. (2002). Board Characteristics and Audit Fees. *Contemporary Accounting Research*, 19(3), 365–384. <https://doi.org/10.1506/CHWK-GMQ0-MLKE-K03V>
- Chapman, R. J. (2022). Financial statement fraud. In *The SME Business Guide to Fraud Risk Management*. <https://doi.org/10.4324/9781003200383-17>
- Christensen, J., Kent, P., & Stewart, J. (2010). Corporate Governance and Company Performance in Australia. *Australian Accounting Review*, 20(4), 372–386. <https://doi.org/10.1111/j.1835-2561.2010.00108.x>
- Donatella, P., Haraldsson, M., & Tagesson, T. (2019). Do audit firm and audit costs/fees influence earnings management in Swedish municipalities? *International Review of Administrative Sciences*, 85(4), 673–691. <https://doi.org/10.1177/0020852317748730>

- El-Chaarani, H., Abraham, R., & Skaf, Y. (2022). The Impact of Corporate Governance on the Financial Performance of the Banking Sector in the MENA (Middle Eastern and North African) Region: An Immunity Test of Banks for COVID-19. *Journal of Risk and Financial Management*, 15(2). <https://doi.org/10.3390/jrfm15020082>
- Eriabie, S., & Dabor, E. . (2017). Audit quality and earnings management in quoted Nigerian banks. *Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies*, 3(1), 1–16. <https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/26995>
- Fama, E. F., & Jensen, M. C. (1983). Separation of Wonership and Control. *Journal of Law and Economics*, 26(2), 301–325. <http://www.journals.uchicago.edu/t-and-c>
- Fathi, J. (2013). The determinants of the quality of financial information disclosed by French listed companies. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 4(2), 319–336. <https://doi.org/10.5901/mjss.2013.v4n2p319>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kaituko, L. E., Githaiga, P. N., & Chelogoi, S. K. (2023). Board structure and the likelihood of financial statement fraud. Does audit fee matter? Evidence from manufacturing firms in the East Africa community. *Cogent Business & Management*, 10(2). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2218175>
- Kantudu, A. ., & Samaila, I. . (2015). Board characteristics, independent audit committee and financial reporting quality of oil marketing firms: evidence from Nigeria. *Journal of Finance, Accounting and Management*, 6(2), 34–50. Retrieved from <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=21532818&AN=103242898&h=Z3pu1%2F2MX8s%2Fzro6Bd59IICu5%2F8yvIBA0afATQcV%2FNGihJkgbQ%2Fhzsq%2B57niVIH%2Fv3ePumB5UCkQL%2FHHQ%2FjvmKw%3D%3D&cr=C>
- Koolivand, A., Salehi, M., Arabzadeh, M., & Ghodrati, H. (2023). The relationship between knowledge-based economy and fraudulent financial reporting. *Journal of Facilities Management*, 21(1), 16–29. <https://doi.org/10.1108/JFM-07-2021-0076>
- Kouaib, A., & Almulhim, A. (2019). Earnings manipulations and board's diversity: The moderating role of audit. *The Journal of High Technology Management Research*, 30(2), 100356. <https://doi.org/10.1016/j.hitech.2019.100356>
- Krauß, P., Pronobis, P., & Zulch, H. (2015). Abnormal audit fees and audit quality: initial evidence from the German audit market. *Journal of Business Economics*, 85(1), 45–48. <https://link.springer.com/article/10.1007/s11573-014-0709-5>
- Li, X., Chen, X., Qi, B., & Tian, G. (2020). Employee quality and audit fee: evidence from China. *Accounting and Finance*, 60(5), 4533–4566. <https://doi.org/10.1111/acfi.12664>
- Maharani, D. A., & Ainiyah, G. Z. (2022). Corporate Governance dan Kualitas Auditor Melalui Fraud. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(2), 393–400. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i2.1285>
- Marsha, F., & Ghozali, I. (2017). The Effect of the size of audit committee, external audit, number of meetings of audit committee, number of meetings of board commissioners and the institutional ownership upon the profit management (Empirical Study of Manufacturing Companies Listed on th. *Diponegoro Journal of Economics*, 6(2), 1–12. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/18245>
- Mousavi, M., Zimon, G., Salehi, M., & Stępnicka, N. (2022). The Effect of Corporate Governance Structure on Fraud and Money Laundering. *Risks*, 10(9), 176. <https://doi.org/10.3390/risks10090176>

- Mukhibad, H., Jayanto, P. Y., & Anisykurlillah, I. (2021). Islamic corporate governance and financial statements fraud: A study of islamic banks. *Journal of Governance and Regulation*, 10(2 Special issue), 361–368. <https://doi.org/10.22495/JGRV10I2SIART16>
- Nasir, N. A. B. M., Ali, M. J., & Ahmed, K. (2019). Corporate governance, board ethnicity and financial statement fraud: evidence from Malaysia. *Accounting Research Journal*, 32(3), 514–531. <https://doi.org/10.1108/ARJ-02-2018-0024>
- Nguyen, H. T. X., Pham, H. T., Dao, N. T., & Nguyen, N. T. (2022). Impact of characteristics of the board of directors on the truthfulness of financial statement information of listed firms in Vietnam. *Cogent Business & Management*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2148870>
- Onaolapo, A. A., Ajulo, O. B., & Onifade, H. . (2017). Effect of audit fees on audit quality: evidence from cement manufacturing companies in Nigeria. *European Journal of Accounting, Auditing and Finance Research*, 5 No.1, 6–17.
- Popa (Sabău), A., Achim, M. V., & Teusdea, A. C. (2024). Corporate governance and financial fraud occurrence – case study on Romanian companies. *The Journal of Risk Finance*, 25(3), 489–509. <https://doi.org/10.1108/JRF-10-2023-0257>
- Prastiti, A. (2013). *Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris dan Komite Audit Terhadap Manajemen Laba*.
- Rostami, V., & Rezaei, L. (2022). Corporate governance and fraudulent financial reporting. *Journal of Financial Crime*, 29(3), 1009–1026. <https://doi.org/10.1108/JFC-07-2021-0160>
- Sadique, R. B. M., Ismail, A. M., Roudaki, J., Alias, N., & Clark, M. B. (2019). Corporate governance attributes in fraud deterrence. *International Journal of Financial Research*, 10(3), 51–62. <https://doi.org/10.5430/ijfr.v10n3p51>
- Uwuigbe, O. R., Olorunshe, O., Uwuigbe, U., Ozordi, E., Asiriwa, O., Asaolu, T., & Erin, O. (2019). Corporate Governance and Financial Statement Fraud among Listed Firms in Nigeria. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 331(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/331/1/012055>